

KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA TERHADAP IMIGRAN

Monica Fiernaya

monica.fiernaya5795@student.unri.ac.id

Pembimbing: Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 15 Jurnal, 14 Buku, 39 Situs

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan Pemerintah Italia terhadap Imigran khususnya sejak tahun krisis imigran terjadi, letak geografi Italia yang bersebelahan dengan Laut Mediterania menjadi sasaran migran untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan meninggalkan negara mereka. Ketidaksepakatan dan ketidakseimbangan tanggung jawab oleh Uni Eropa kepada anggotanya untuk menyeragamkan kebijakan dalam merespon isu ini. Hal ini mengharuskan Italia mengambil kebijakan masuknya migran ke wilayah mereka dengan memperketat beberapa aturan. Keputusan yang diambil karena adanya faktor-faktor dorongan lain yang akan dijelaskan dan dianalisa lebih lanjut pada penelitian ini.

Penulis menggunakan metode *library research* dan penelitian kualitatif. Analisa dalam penelitian ini menggunakan tingkatan analisa unit atau negara, dengan menggunakan teori sekuritisasi, penggunaan teori ini dikarenakan munculnya agenda keamanan yang diambil karena adanya isu yang muncul dari imigran ini bahkan hingga tahap dipolitisasi. Perspektif Konstruktivisme juga digunakan dalam penelitian ini untuk membedah fenomena yang terjadi, perspektif ini dipilih karena kebijakan Italia merupakan hasil dari rezim Uni Eropa.

Kebijakan Pemerintah Italia dalam mengontrol serta mengatasi imigran yang datang menghasilkan sebuah dilematis, ketidakmampuan anggota Uni Eropa dalam hal ini Italia dan ketidaksepakatan yang ada dalam rezim Uni Eropa menjadikan negara-negara yang menjadi gerbang utama migran mengalami kesulitan.

Kata Kunci: Imigran, Italia, Laut Mediterania, Kesepakatan Uni Eropa

ITALIAN GOVERNMENT POLICIES TOWARD IMMIGRANT

Monica Fiernaya

monica.fiernaya5795@student.unri.ac.id

Advisor: Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliography: 15 Journals, 14 Books, 39 Websites

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research will explain about Italia policies regarding immigrants especially in time of immigrant crises that happened, Italia geography position that is near to Mediterranean Sea put Italia as a target of migrants for seeking a better live and leave their origin country. As a result, migrants flow to Italy keep increasing and hard to control, the disagreement and the unbalance responsibilities that given from European Union to its member to simlize the policies in response to migrants. It requires Italia to take a policy to tighten up immigrants to get into their territory and stricter their rules. This research also uses library research methods and qualitative methods.

This research use library research methods and qualitative research. This analyses use unit/state level analysis, the using of securitization theory due to the emergence of security agenda that is occurred. Constructivism perspective is also use in this research to anaylize the phenomenon that occurs, this perspective is use due to Italia policies is the result of European Union regime and stigmatization towards immigrant.

However, Italia policies related in border control and also in managing overflow migrants result in dilemma, the inability of European Union and disagreement in European Union regime of the countries that become the main spurpose of the migrant that suffers.

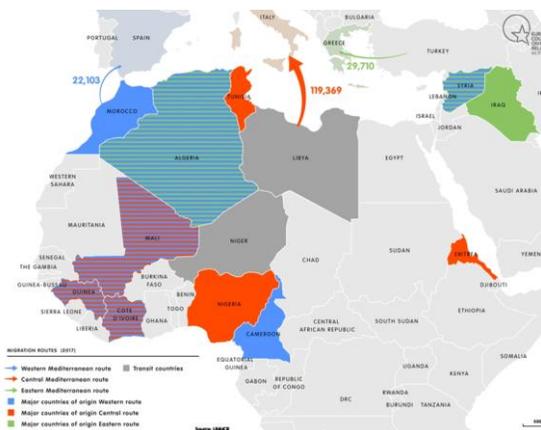
Key words: Immigrants, Italia, Mediterranean Sea, European Union Agreement

Latar Belakang

Dalam sudut pandang *human security*, gelombang migrasi yang disebabkan oleh perasaan tidak aman di negara asalnya dapat dikatakan sebagai krisis kemanusiaan. Kriteria krisis kemanusiaan yakni terdapat situasi yang mengancam keamanan

individu baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun identitas. Karenanya, masyarakat yang terperangkap dalam situasi yang mengancam cenderung melihat kesempatan untuk masuk ke dalam teritorial negara lain baik menggunakan cara legal maupun ilegal.

Ancaman yang timbul dari fenomena imigrasi akibat rasa ketidaknyamanan tidak hanya dirasakan oleh para imigran yang mengungsikan diri, namun juga dirasakan oleh negara karena adanya kemungkinan menjadi potensi ancaman bagi negara penerima imigran. Misalnya ketidaksiapan negara secara administrasi dan masyarakat terhadap imigran, dampak penerimaan imigran terhadap stabilitas politik dan ekonomi adalah menjadi isu utama di beberapa negara dalam beberapa tahun ke belakang, sebagaimana negara-negara Eropa yang menghadapi krisis imigran di Laut Mediterania.



Gambar 1.1 Rute Imigrasi dari benua Afrika menuju Italia

Sumber:

https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration

Isu imigran merupakan salah satu agenda politik Uni Eropa, mengingat eskalasi imigran yang datang ke negara-negara Eropa. Sejak 2014, warga Eropa terlibat diskusi intensif yang membahas tentang kebijakan imigrasi. Langkah ini merupakan respon warga Eropa terhadap meningkatnya jumlah

pengungsi dan migran lainnya yang memasuki Eropa. Banyak dari mereka bermigrasi sebagai upaya melarikan diri dari konflik berkepanjangan di Afrika dan Timur Tengah, khususnya perang di Suriah.

Fenomena imigrasi ini memuncak pada 2015, dimana terdapat lebih dari satu juta orang tiba di Eropa, sebagian besar dari mereka telah melakukan perjalanan di sepanjang rute timur melalui Turki, Yunani dan Balkan. Jumlah kedatangan mereka kemudian turun cukup signifikan pada 2016. Meski begitu, tetap terdapat lebih dari 160.000 orang mencapai Eropa melalui rute Mediterania setiap tahunnya.¹

Italia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa yang terletak di jalur Laut Mediterania menjadi jalur masuk gelombang imigran melalui Laut Mediterania Tengah untuk mencapai Uni Eropa sebagai usaha para imigran dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan mereka berupaya mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik. Itu sebabnya Italia terus berusaha membuat agenda yang dapat memecahkan masalah imigran.

Laut Mediterania adalah jalur bagi tiga rute migrasi utama yang digunakan oleh para imigran, pengungsi, dan pencari suka untuk menyeberang ke Eropa. Rute ini meliputi Rute Mediterania Tengah, yang mengacu pada perjalanan laut dari Utara Afrika (terutama Libya) ke

¹ The European Council on Foreign Relations (ECFR), "The Mediterranean and Migration: Postcards from a 'crisis'". Diakses di: https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration pada 20 Oktober 2020.

Italia, Rute Mediterania Timur yang mengacu pada penyeberangan laut dari Turki ke Yunani dan Rute Mediterania Barat, yaitu laut yang melintasi dari Maroko ke daratan Spanyol. Rute Mediterania tengah sejauh ini adalah yang paling berbahaya. Rute Mediterania Tengah mengacu pada campuran migrasi atau yang lebih dikenal dengan *mixed migration* dari Afrika Utara menuju Italia dan Malta. *Mixed migration* sendiri dapat dijelaskan dengan adanya kombinasi faktor pendorong yang terjadi, termasuk yang memburuksituasi politik dan keamanan di Libya, kondisi yang semakin memprihatinkan di negara-negara transit dan suka pertama ataupun adanya kontrol perbatasan yang lemah dalam perjalanan dan negara yang dituju.

Dalam hal ini, Italia yang menjadi gerbang terdepan daratan Eropa, mentransfer pengungsi dan imigran yang tiba di pulau Lampedusa ke daratan untuk diproses. Lampedusa, yang menanda wilayah paling selatan Italia dalam perbatasan dan menjadi Pulau terdekat dari Libya, menjadikan Pulau Lampedusa menjadi titik masuk yang digunakan oleh pengungsi dan imigran bersamaan dengan Pulau Sisilia dan Sardinia.

Kerangka Teori

Analisa dalam penelitian ini menggunakan tingkatan analisa unit atau negara, yang berfokus pada dinamika kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Italia terhadap responnya dalam mengontrol serta mengatasi imigran yang datang. Disamping itu, konstruksi persepsi yang dibangun oleh Pemerintah Italia memperkuat

penulis untuk menetapkan level analisa terhadap negara. Penelitian menggunakan perspektif konstruktivisme, dimana fenomena yang terjadi sejalan dengan hasil interaksi antar Pemerintah Italia sebagai sebuah negara dengan imigran sebagai aktor dalam tataran internasional, yang mampu mempengaruhi suatu kebijakan yang menjadi bentuk dari kepentingan negara, sehingga korelasi hubungan antar aktor dan dampak yang timbul melalui kebijakan maupun terhadap imigran menjadi objek kajian penulis dalam penelitian ini serta menggunakan teori sekuritisasi dari Buzan dan Weaver.

Konflik Politik di Kawasan Timur Tengah

Arab Spring yang bermula pada tahun 2011, dimana Mohamed Bouazizi seorang penduduk Tunisia, membakar dirinya di depan kantor Pemerintahan

Tunisia, merupakan sebuah aksi protes dan frustrasi akan ketidakstabilan ekonomi di negaranya, dimana baginya, kondisi Tunisia sangat sulit untuk mencari pekerjaan, pengangguran yang merajalela dimana-mana dan mendapatkan kehidupan yang stabil untuk menggulingkan pemimpinnya, Ben Ali. Disinilah bermula fenomena Arab Spring di negara-negara Kawasan Timur Tengah yang menjadi sebuah domino satu sama lain untuk memprotes Pemerintahan mereka masing-masing karena dianggap telah gagal dalam menanggapi isu ekonomi dan kesejahteraan di negara mereka.

Fenomena ini bermula di negara Tunisia lalu merambah ke negara-negara seperti Moroko, Syria maupun Libya. Perang Persaudaraan yang tidak henti-hentinya di Syria pada masa pemerintahan Bashar Al-Assad yang juga memiliki kepemimpinan otoriter, dan dianggap melanggar hak-hak asasi manusia, Kepemimpinan Muammar Gadafi yang lebih dari empat dekade dan eksistensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap oposisinya, isu-isu ini menjadi pendorong terbesar ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah.

Percobaan pelengsesran di Tunisia juga menginspirasi percobaan pelengsesran Husni Mubarak di Mesir setelah pengunjuk rasa secara massal meminta Husni Mubarak untuk mengundurkan diri, masalah-masalah korupsi yang dilakukan Mubarak maupun pengikutnya, tingginya angka kemiskinan yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Mesir menjadi pendorong masyarakat untuk melakukan revolusi untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

Hal ini menjadikan Kawasan Timur Tengah rentan akan keamanan kemanusiaan dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang stabil bahkan dalam pencarian kebutuhan hidup sehari-hari, politisasi terhadap agama juga menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang rentan akan perkembangan dan jaringan terorisme.

Pada tahun 1999, Uni Eropa mencanangkan dibentuknya Common European Asylum System, melalui ini Uni Eropa mengharapkan adanya

reformasi sistem yang lebih baik lagi, dan tanggung jawab yang setara diantara negara-negara Uni Eropa. Adanya standarisasi dalam regulasi juga dilakukan melalui Asylum Procedures Directive, Reception Conditions Directives, Temporary Protection Directive, Qualification Directive, Eurodac Regulation serta Dublin Regulation. dimana regulasi ini mencakup beberapa diantaranya pemberian perlindungan internasional, adanya standarisasi yang sama dalam penegakan hukum, maupun dalam informasi yang digunakan.

Menanggapi krisis imigran yang terjadi, Uni Eropa mengusulkan adanya kesepakatan dan solidaritas bersama dalam merespon kebijakan mengenai imigran, dimana usulan tersebut mengenai kuota pengungsi bagi negara-negara di Uni Eropa yang ditentukan oleh hasil dari GDP, populasi dan kekayaan negara penerima. Tidak semua usulan awal Uni Eropa terhadap imigran disetujui dan diadopsi oleh negara-negara Eropa lainnya, beberapa negara seperti Hungaria dan Polandia, mengabaikan desakan negara-negara lain dan Uni Eropa untuk membuka perbatasannya untuk menerima sistem kuota yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, dimana negara-negara ini melihat Uni Eropa telah gagal dalam merespon imigran dan berdampak pada regulasi yang dibuat sendiri oleh negara-negara ini. meningkatnya xenophobia, rasisme dan ketakutan akan identitas baru yang dibawa oleh para pengungsi atau imigran menjadi salah satu faktor yang membentuk kebijakan di negara-negara yang tidak mau membuka perbatasannya.

Pada tahun 2015, Uni Eropa juga membentuk EU Trust Fund for Africa, Sebuah inisiatif dalam merespon akar masalah migrasi dari Afrika, ketidakstabilan, pemindahan paksa dan migrasi tidak teratur dan berkontribusi pada manajemen migrasi yang lebih baik. Lembaga Uni Eropa, beberapa diantaranya kepada negara-negara seperti Moroko, Nigeria, Niger, Somalia, Libya dst.

Sentimen Anti-Imigran

Pendorong utama sikap anti-imigran adalah persepsi ancaman yang memicu ketakutan bahwa imigran akan berdampak negatif pada lingkungan hidup seseorang, penduduk yang menerima imigran cenderung memandang mereka sebagai ancaman terhadap sumber daya mereka, Persaingan ini dapat terjadi karena masalah seperti pasar tenaga kerja, maupun nilai-nilai seperti agama dan budaya yang dibawa. Dalam beberapa kasus yang terjadi, ancaman yang dianggap paling nyata dari orang-orang anti-imigran adalah ancaman ekonomi yang dibebankan terhadap suatu negara, hal ini berdampak pada kekhawatiran penduduk asli terhadap ancaman lapangan pekerjaan yang mungkin diambil oleh imigran.

Kejadian-kejadian terorisme seperti ISIS meningkatkan ketakutan para imigran yang datang dari negara-negara Timur Tengah.. Pengelolaan perbatasan Eropa yang dianggap salah, memungkinkan teroris masuk melalui jalur migrasi. Pasca serangan teroris Paris November 2015, masalah keamanan ini tumbuh secara signifikan, karena salah satu pelaku serangan diduga masuk ke Eropa

sebagai pengungsi. Sehingga, kedatangan imigran seringkali disangkutkan terhadap kejahatan terorisme.

Sikap anti-imigran ini seringkali mendorong perkembangan nativisme yang ada, nativisme sendiri mengacu pada kebijakan atau keyakinan yang melindungi atau mendukung kepentingan penduduk asli suatu negara di atas kepentingan para imigran. Orang-orang nativisme ini seringkali membatasi masuknya imigran untuk mempertahankan identitas, budaya maupun nilai-nilai yang mereka miliki.

Dominasi imigran dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang memeluk agama islam, menjadi sebuah pertimbangan lain bagi negara penerima imigran ini, identitas yang dibawa dianggap berbeda dan menimbulkan sentimen terhadap imigran. Menurut Pew Research Centre contohnya, pandangan mereka terhadap Muslim sangat bervariasi di seluruh Eropa, setengah atau lebih di negara Hongaria, Italia, Polandia, Yunani dan Spanyol memiliki pandangan yang sangat atau agak tidak menyenangkan tentang Muslim. Dan di Italia (36%), Hongaria (35%) dan Yunani (32%), kira-kira sepertiga memiliki pendapat yang sangat tidak baik. Mayoritas di negara-negara lain yang disurvei mengungkapkan sikap positif tentang Muslim. Meskipun demikian, setidaknya seperempat di setiap negara memiliki pandangan negatif terhadap Muslim.

Kenaikan Pemimpin Sayap Kanan di Italia

Di Italia, kenaikan pemimpin sayap kanan dapat dilihat dari partai Five star Movement (MSF), partai ini mengusung Matteo Salvini, yaitu Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri pada masa Presiden Matteo Renzi, dari tanggal 1 June 2018 hingga 5 September 2019. Pada tanggal 10 Juni 2018, tidak lama setelah pelantikannya, melalui kebijakannya, Salvini menutup beberapa pelabuhan Italia dengan tujuan melawan illegal immigration dan menahan masuknya imigran ke Italia. Salvini memang terkenal terkenal sebagai politisi sayap kanan yang memiliki prasangka anti-imigran dan anti-muslim, dalam kampanyenya sebelum menduduki posisi Menteri Dalam Negeri, Salvini telah beberapa kali menggugah postingan mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh migran di Italia melalui akun media sosial facebook-nya

Beberapa aturan dan keputusan juga dirancang oleh Salvini terkait imigran yang datang ke Italia, peraturan-peraturan ini dikenal dengan Salvini Decree atau "Keputusan Salvini", keputusan ini dinamai menurut nama wakil perdana menteri / menteri dalam negeri Italia, keputusan tersebut, akan mulai berlaku ketika dan jika presiden menandatangani, beberapa kebijakannya yaitu:

Pertama, kebijakan untuk mencabut visa kemanusiaan terhadap para imigran berdampak pada kesulitan akses imigran di Italia, peningkatan orang tanpa adanya status hukum, yang berarti mengharuskan masyarakat sipil untuk menyediakan dokumen-dokumen resmi yang mereka miliki di negara dimana mereka

datang. Keputusan ini akan membatasi kriteria untuk mendapatkan visa kemanusiaan untuk tetap berada di Italia. Visa dan perlindungan kemanusiaan yang telah membantu imigran dari pelecehan yang ekstrem, tetapi perlindungan kemanusiaan ini akan dicabut jika imigran ini tidak memenuhi definisi pengungsi yang sempit di bawah Konvensi Pengungsi 1951. Keputusan Salvini tersebut juga akan membatasi akses ke tempat penampungan yang memadai bagi pencari suaka yang rentan, selain dari 20.000 ruang yang dipotong sejak pemerintah ini berkuasa pada bulan Juni. Hal ini mengartikan bahwa populasi imigran yang ada di Italia rentan akan status hukum serta perubahan para imigran yang datang dan pergi disebabkan sulitnya dalam pemenuhan syarat yang ada.

Kedua, adanya pelarangan bagi kapal-kapal yang memasuki teritorial Laut Italia, juga penjatuhan hukum terhadap kapten yang membawa kapal yang mengangkut para pencari suaka, sebagai contoh kapten Carola Rackete yang ditahan Juni 2019 lalu dengan memaksa untuk

masuk ke Pulau Lampedusa di Italia. Hal ini bertujuan membuat efek jera terhadap kapten-kapten yang berencana untuk masuk ke wilayah Laut Italia tanpa adanya izin secara formal.

Ketiga, Adanya pemberian denda kepada organisasi non-pemerintah yang menolong serta melabuhkan para imigran di wilayah Italia khususnya di Pulau Lampedusa yang terjadi pada Juli 2019 lalu, dimana kapten Sea Watch—sebuah

organisasi non-pemerintah yang bergerak untuk menolong pengungsi yang terlantar di lautan melalui kapal-kapal milik organisasi—ditangkap karena telah melanggar otoritas Pemerintah Italia dengan melabuhkan para imigran menegaskan sikap Italia bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Closed Ports Policy. Terlantarnya para imigran hingga berminggu-minggu di lautan merupakan implikasi dari kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Italia karena efek jera yang berusaha ditimbulkan oleh kebijakan mereka terhadap organisasi non-pemerintah, kasus-kasus ini seringkali terjadi bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Keputusan ini diambil sebagai suatu bentuk sekuritisasi terhadap imigran atau persepsi terhadap ancaman terhadap keamanan secara eksternal yang mungkin dibawa oleh imigran, maupun internal dari dalam Pemerintahan Italia.

Namun, hal tersebut tidak hanya terjadi di Italia, pemimpin-pemimpin sayap kanan di negara-negara Uni Eropa juga melihat sebuah kesempatan untuk mengangkat isu ini dan mengambil pendirian yang cukup kuat dengan mengkonstruksi pandangan masyarakat Eropa. Sentimen anti-migran dari partai-partai sayap kanan mulai sering digaungkan khususnya pasca terjadinya serangan terorisme Paris yang terjadi pada tahun 2015, Tragedi ini diduga disebabkan oleh pengungsi yang masuk ke Eropa yang sebelumnya diketahui berada di Yunani, sehingga keputusan untuk menghentikan migran diambil oleh

Marine Le Pen sebagai sebuah tindakan pencegahan akan terjadinya tindakan-tindakan terorisme lainnya di Prancis, kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan sayap kanan dari Marine Le Pen terhadap isu migran.

Kerjasama dengan Libya

Kerjasama Italia-Libya telah dilakukan sejak tahun 2000 dalam menanggulangi imigran, kerjasama Italia-Libya dalam merespon migran dapat dilihat dari ditandatanganinya perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai imigran pada tahun 2017 lalu. Beberapa isi dari MoU ini yaitu adanya bantuan dari Italia dalam bentuk uang dan pelatihan terhadap otoritas maritim Libya dalam mencegah, memberhentikan dan kapal di Laut dan memulangkan imigran kembali ke Libya. Isi substansi ini ditujukan untuk mencegah datang dan berlabuhnya imigran dari Libya ke Italia. Marco Minniti, Menteri Dalam Negeri Italia dari Juni 2016 hingga Januari 2018, membentuk sebuah perjanjian dengan pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli untuk mencegah imigran menyeberangi Mediterania.

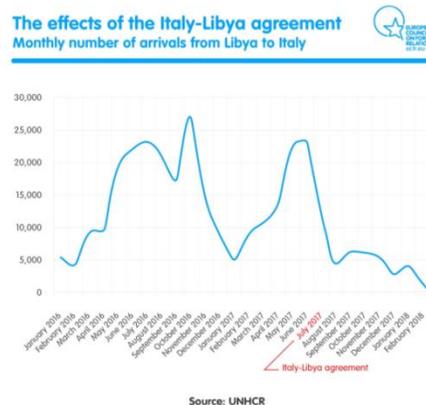
Perjanjian ini diperpanjang di tahun 2020 tanpa adanya amandemen untuk tiga tahun kedepan, berdasarkan bentuk penawaran bantuan Pemerintah Italia terhadap Libya tersebut, bentuk bantuan yang ditawarkan oleh Pemerintah Italia berupa pelatihan, pemberian perlengkapan dan pemberian dukungan terhadap Penjaga Pantai Perbatasan Libya dan otoritas Libya lainnya, dengan tujuan memberikan bantuan, memungkinkan mereka untuk dapat mencegah orang di

Laut yang berusaha melarikan diri dan kembali memulangkan mereka ke Libya.

Namun, kerjasama ini dianggap hal yang mengkhawatirkan bagi orang-orang yang melarikan diri dari Libya maupun dari kaca mata hak asasi manusia, pasalnya, setelah dipulangkan kembali ke Libya, imigran-imigran ini kembali berada di posisi yang beresiko dibawah kekerasan dan ketidakjelasan kesejahteraan dibawah kondisi Pemerintah yang tidak stabil, bahkan, dalam pada beberapa kasus, migran-migran ini dibawa ke pusat penahanan Libya di mana mereka menderita pelanggaran hak asasi manusia dan diabaikan.

Mereka yang melarikan diri dari Libya, bukan hanya imigran dengan kewarganegaraan Libya semata, namun juga migran-migran dari negara lain Sudan (untuk mereka yang datang dari Afrika Timur), Niger (bagi mereka yang datang dari Afrika Barat dan Tengah), atau, pada tingkat yang lebih rendah, Aljazair (bagi mereka yang berasal dari Afrika Barat).

Gambar 4.1 Dampak dari Kerjasama Italia-Libya terhadap Kedatangan Pengungsi dan Imigran di Italia



Beberapa isi dari MoU tersebut diantaranya:

1. memulai inisiatif kerjasama sesuai dengan program dan kegiatan yang diadopsi oleh Libya, Dewan Kepresidenan dan Pemerintah Libya dalam kesepakatan nasional, sehubungan dengan dukungannya lembaga

keamanan dan militer untuk membendung arus para migran ilegal dan menghadapi mereka konsekuensi, sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Perjanjian Persahabatan, Kemitraan dan Kerjasama ditandatangani oleh kedua negara dan oleh perjanjian dan nota pemahaman yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Pihak Italia memberikan dukungan dan pembiayaan untuk program pembangunan di wilayah yang terkena dampak oleh fenomena imigrasi ilegal, dalam berbagai sektor, seperti energiterbarukan, infrastruktur, kesehatan, transportasi, pengembangan sumber daya manusia, pengajaran, pelatihan personel dan penelitian ilmiah.

3. Pihak Italia berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis dan teknologi kepada lembaga-lembaga Libya bertanggung jawab atas perang melawan imigrasi ilegal, dan yang diwakili oleh penjaga perbatasan dan penjaga pantai dari Kementerian Pertahanan dan oleh badan dan departemen yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri.

Sejak disahkannya Memorandum of Understanding antara Italia-Libya pada tahun 2017, angka imigran dari Libya yang juga didominasi oleh migran dari negara-negara Afrika Utara terus menurun, hal ini merupakan hasil dari kerjasama dalam penanggulangan migran yang disepakati kedua negara. Dapat dilihat dari grafik di atas, penurunan yang terjadi cukup signifikan, sebelum ditandatanganinya MoU ini, UNHCR mencatat jumlah imigran yang masuk ke Italia mencapai lebih dari 20.000-an imigran pada bulan Juni 2017, grafik tersebut terus merosot setelah ditandatanganinya MoU ini.

Closed Ports Policy dan Penjatuhan hukuman pada NGO

Organisasi non-pemerintah menjadi kunci utama dalam operasi pencarian dan penyelamatan di Laut, rendahnya angka kematian juga bergantung sejauh mana efektivitas operasi yang sedang dijalankan oleh NGO ini.

Médecins Sans Frontières (MSF) merupakan organisasi kemanusiaan medis internasional independen yang memberikan bantuan darurat kepada masyarakat korban konflik bersenjata, epidemi, bencana

alam dan masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Kami memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan mereka tanpa memandang ras, agama, gender atau pandangan politik, organisasi ini berbasis di Jenewa, Swiss dan memiliki 24 cabang asosiasi di seluruh dunia.

Kapal Aquarius, yang dioperasikan bersama oleh Médecins Sans Frontières (MSF) dan SOS Méditerranée bergerak dalam pencarian dan penyelamatan terhadap migran dan pengungsi yang berpatroli di perairan sekitar Sisilia, Lampedusa, dan di dekat pantai Libya sebagai bagian dari krisis migran Eropa—pada saat itu membawa lebih dari 600 migran, namun dalam usahanya untuk berlabuh di pelabuhan Italia, Kapal Aquarius ditolak oleh otoritas Italia sebelum akhirnya berlabuh di Spanyol. Hal ini mengakitbatkan kerentanan terhadap para migran karena tidak adanya pertolongan terdekat oleh Pemerintah Italia untuk membiarkan kapal ini berlabuh.

Pada Februari 2020, Senat Italia secara resmi mengesahkan persidangan terhadap Salvini atas kasus kapal penjaga pantai Italia Gregoretti, di mana - sebagai Menteri Dalam Negeri saat itu - ia membiarkan kapal berminggu-minggu untuk diselamatkan dengan melarang kapal berlabuh di pelabuhan Augusta, Sisilia. Pada kasus lain, yaitu Agustus 2019, ketika Open Arms dengan 147 migran yang harusnya diselamatkan di laut terpaksa berlabuh di Pulau Lampedusa sementara kondisi di atas kapal memburuk setelah juga dibiarkan

selama tiga minggu di laut lepas. Tragedi ini berakhir ketika Jaksa Italia akhirnya memerintahkan pemerintah untuk mengambil-alih kapal itu dan membawanya ke pelabuhan. Salvini dituduh secara tidak sah menolak Open Arms untuk berlabuh di Lampedusa, sehingga merampas kebebasan 147 wanita, pria dan anak di bawah umur yang harusnya diselamatkan.

Kapal Aquarius, Sea Watch 3 menjadi beberapa kapal yang dijatuhi hukum oleh otoritas Italia. Pada kasus Kapal Sea Watch 3, mereka harus terombang-ambing di lautan sekitar 16 hari tanpa berlabuh manapun, Pada akhirnya, Kapten kapal memutuskan untuk menentang perintah larangan otoritas Italia dia memasuki perairan Italia dan terus berlayar ke pelabuhan Lampedusa, Italia, di mana dia bertabrakan dengan sebuah kapal Guardia di Finanza. Di sini, kapten kapal Sea Watch 3 ditangkap dan didakwa sesuai dengan undang-undang yang disahkan hanya beberapa hari sebelumnya.

Pada kasus kapal Aquarius di bulan Juni tahun 2018, kapal pencarian dan penyelamatan ini mengangkut sekitar 123 penumpang, kapal ini dibiarkan terombang-ambing tanpa ada kejelasan untuk berlabuh di Laut Mediterania setelah menteri dalam negeri garis keras Italia sertapemimpin partai Liga anti-imigrasi menolak untuk mengizinkannya berlabuh. Para imigran ini telah mengalami mabuk laut karena lamanya durasi mereka di lautan dan telah mencoba mencari pertolongan perawatan medis dari Doctors without Borders atau

Medecins Sans Frontieres (MSF)—organisasi kemanusiaan independen yang memberikan bantuan medis bagi orang-orang yang terdampak konflik, bencana dsb—yang beroperasi di sepanjang lautan. Hal ini dilakukan oleh otoritas Italia sebagai usaha dalam menahan arus pencari suaka dan imigran yang datang, walaupun hal ini dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement dibawah PBB, namun, otoritas italia, khususnya Salvini melihat hal ini sebagai kesempatan imigran untuk mengambil resiko menyebrangi lautan untuk diselamatkan dan dilindungi oleh negara yang menerima mereka.

Namun, apabila kapal-kapa ini tetap berusaha menentang keputusan dari otoritas Pemerintah Italia, maka Italia akan memaksa organisasi non-pemerintah untuk membayar denda antara 10.000 hingga 50.000 Euro (atau sekitar 11.327 - 56.638 dolar Amerika) untuk mengangkut migran yang diselamatkan ke pelabuhan Italia. Bahkan, bagi tim penyelamat yang berulang kali merapat ke wilayah Italia tanpa adanya izin, akan menghadapi resiko penyitaan kapal secara permanen dan denda akan dibayarkan oleh kapten, operator maupun oleh pemilik kapal penyelamat. Namun, beberapa surat keputusan mengenai migran masih ditangguhkan karena adanya kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkut keselamatan migran di Laut dan kritikan dari Pemerintah secara internal. Bahkan pelarangan yang dilakukan oleh Pemerinah Italia ini banyak mendapat kecaman dari masyarakat internasional, pasalnya hal ini menaruh hak asasi manusia pada

posisi kritis sebelum mendapatkan pertolongan.

Kasus lainnya juga terjadi pada kapal bernama Lifeline, yaitu sebuah kapal yang dioperasikan oleh organisasi non-pemerintah Jerman, kapal ini memuat lebih dari 200 imigran dan pengungsi di dalamnya. Kapal ini diblokir untuk memasuki perairan Italia, dimana pemerintah Italia menolak kapal yang membawa orang-orang yang telah diselamatkan di Laut Mediterania. Lifeline telah menunggu dalam ketidakpastian setelah menjemput sekitar 239 orang antara Libya dan pulau Lampedusa di Italia. Namun, pemerintah Italia telah mendesak Malta untuk menerima kapal Lifeline. Pemerintah di Italia mengatakan kapal Lifeline tidak mematuhi perintah penjaga pantai Italia untuk membiarkan penjaga pantai Libya menyelamatkan para imigran

Pengadaan Mare Nostrum Operation

Pada Oktober 2013, lebih dari 300 migran tewas di dekat pulau Lampedusa, Italia, akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam di lautan. Polisi laut Italia hanya berhasil menyelamatkan sekitar 150 orang dari 500-an orang yang menumpang kapal tersebut. Dengan adanya insiden tersebut, Italia mengambil sebuah tindakan dimana operasi tersebut dinamakan "Operation Mare Nostrum". Operasi ini merupakan pencarian dan penyelamatan besar-besaran dalam rangka mencegah tewasnya migran yang melakukan perjalanan ke Eropa.

Melalui Mare Nostrum, angkatan laut Italia berpatroli di 70.000 kilometer persegi Laut Mediterania, sebuah area yang mencakup zona pencarian dan penyelamatan di Libya, Malta serta Italia, dimana lebih dari 100.250 migran diselamatkan oleh Mare Nostrum, sementara lebih dari 3.300 migran lainnya meninggal di laut saat mencoba menyeberangi Mediterania selama interval waktu ini. Meskipun Mare Nostrum merupakan operasi pencarian dan penyelamatan yang efektif, biaya pemeliharaan Mare Nostrum menjadi terlalu mahal untuk ditanggung sendiri oleh pemerintah Italia; hal ini menempatkan Italia secara tidak adil memikul biaya yang memberatkan dari misi ini untuk semua negara anggota UE. Hal ini menyebabkan keputusan Italia untuk menghentikan Mare Nostrum dan kembali ke operasi reguler.

Daftar Pustaka Jurnal dan Working Papers:

- Corsi, Cecilia. (2019). Evaluating the 'Salvini Decree': Doubts of Constitutional Legitimacy. Schuman Centre for Advanced Studies. Westview Press, Colorado.
- D.J. Harris, Cases and Materials on International Law (Sweet and Maxwell, 2004) Hal 564.
- European Commission. (2019). The European Council and The Council: Progress Report on the Implementation of The European Agenda on Migration.
- Huysmans, J. (2000). The European Union and the Securitization

- of Migration, *Journal of Common Market Studies*, Vol. 38 (5), 751-777.
- International Organization for Migration. (2019). *Mixed Migration Flows in the Mediterranean*.
- James L. Newell. (2019). *Contemporary Italian Politics: Italy's New Government and The Migrant Crisis*. Vol. 11, No.4.
- International Organization for Migrations. (2012). *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Suatu negara)*
- International Organization for Migration. *Mixed Migration Flows in the Mediterranean*. Hal. 4.
- International Conference on Population and Development. (1994). *International Symposium on Migration-Bangkok (1999)*.
- The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan Protocol Against of Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing UN TOC
- Stern, R. T. Responses to the "refugee crisis": What is the role of self-image among EU countries? *European Policy Analysis*(10), 1-16. Swedish Institute for European Policy Studies.
- Giffoni, Francesco and Matteo Gomellini. 2015. 'Brain Gain in the Age of Mass Migration', *Banco d'Italia Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)*, Number 34.
- Felice, E. (2011). 'The determinants of Italy's regional imbalances over the long run: exploring the contributions of human and social capital', Oxford University Discussion Papers in Economic and Social History No. 88.
- Wike, Richard and Bruce Stokes, Katie Simmons. (2016) *Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs*. Pew Research Centre.
- Buku:**
- Buzan, B. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for security Analysis in the Post-Cold War Era*. Brighton: Weatsheaf.
- Buzan, Barry and Ole Weaver. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rinner: Colorado.
- Egger, H. and G. Felbermayr. 2009. *Endogenous skill formation and the source country effects of emigration from developing countries*, *Journal of Economics and Statistics*.
- Gomellini, M. and C. Ó Gráda. 2013. 'Migrations', in G. Toniolo ed. *The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification*, New York: OUP.
- Kenneth N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. McGrawhill: New York.
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (edisi revisi)*. LP3ES: Jakarta.
- Parkes, R. 2017. *Nobody Move! Myth of the EU Migration Crisis*. Paris: EU Institute for Security Studies.
- Sigona, N. 2017. *The Contested Politics of Naming in*

Europe's "Refugee Crisis". *Ethnic and Racial Studies*.

Sørensen, N. N., Kleist, N., & Lucht, H. 2017. *Europe and the Refugee Situation: Human Security Implications*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

Thym, D. 2016. *The Refugee Crisis as a Challenge of Legal Design and Institutional Legitimacy*.

Common Market Law Review, 53

Viotti, Paul R dan Mark V. Kauppi. (1990). *International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism*. New York: MacMillan Publishing Company.

Winarno, Budi 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Wendt, Alexander. 1998. *Constructing International Politics, dalam Theories of War and Peace*. ed. Michael E. Brown et.al. Cambridge dan London: MIT Press.

Zehfuss, Maja. 2004. *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge University Press: Cambridge, UK.

Situs:

Bolter, Jessica. 2019. "Explainer: Who is an Immigrant?". Diakses di: <https://www.migrationpolicy.org/content/explainer-who-immigrant> (Diakses pada 31 Oktober 2020)

The European Agenda on Migration: EU needs to sustain progress made over the past 4 years. Tersedia di <https://ec.europa.eu/commissio>

[n/presscorner/detail/en/IP_19_1496](https://www.presscorner/detail/en/IP_19_1496) (Diakses pada September 2020)

Eroukhmanoff, Clara. 2018. "Securitization Theory: An Introduction". Diakses di: <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/> (Diakses pada 15 Januari 2020)

Giuffrida, Angela. 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/apr/17/salvini-crossed-red-line-in-pushing-refugee-boat-policy-says-military> (Diakses pada 18 Oktober 2020)

Khoser, Khalid. 2007. *International Migration: A Very Introduction*. Tersedia di: <http://bookfi.net/dl/1054993/bf844e> (diakses 11 Desember 2020)

McDonald-Gibson, C. 2015. *Europe's Anti-Immigrant Parties Make Hay From Paris Terrorist Attack*, dari TIME. Diakses di: <http://time.com/3659471/paris-terror-attack-europe-far-right-populist/> (diakses pada 17 Oktober 2020)

Portes, Jonathan. 2014. "Immigration: Could we – should we – stop migrants coming to Britain?". Diakses di: <https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/19/immigration-policy-ukip-restrictions-european-union>. (Diakses 15 Desember 2020)

Sunderland, Judith. "Italy's New Government Should Undo Its Worst Migration Policies." Tersedia di: <https://www.hrw.org/news/2019/09/05/italys-new-government-should-undo-its-worst-migration-policies-0> (Diakses pada 6 Januari 2020)

Stokes, B. 2016. The Immigration Crisis Is Tearing Europe Apart, dari Foreign Policy. Tersedia di:

<http://foreignpolicy.com/2016/07/22/the-immigration-crisis-is-tearing-europe-apart/> (Diakses pada 9 September 2020)

Vermeulen, Marten. 2019. <https://thecorrespondent.com/93/10-questions-that-explain-the-european-unions-migration-policy/12299086041-3a16f02d> (Diakses pada 20 November 2020)

You Matter Organization. 2020. "Globalization: Definition, Benefits, Effects, Examples- What Is Globalization?". Tersedia di:

<https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-definition-benefits-effects-examples/> (Diakses pada 14 Oktober 2020)